**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pendidikan berperan untuk membangun manusia seutuhnya sebagai manusia Pancasila. Hal itu sesuai dengan fungsi pendidikan yaitu memanusiakan manusia dengan cara yang manusiawi. Perkembangan dalam masyarakat akan membawa pengaruh terhadap perkembangan nilai dan konsep di bidang pendidikan, karena perkembangan ilmu dan teknologi semakin pesat dalam masyarakat, maka terjadi perubahan-perubahan yang perlu ditransformasikan di lembaga pendidikan. Fungsi pendidikan secara luas harus mampu membentuk keterampilan kerja dan mampu mengkaitkan fungsi peserta didik dengan masyarakat sebagai suatu orientasi yang paling mendasar dalam mentransformasikan pendidikan.

Plato mendemonstrasikan dalam buku tersebut bahwa dalam budaya *Helenik*, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik. Plato menggambarkan adanya hubungan dinamis antara aktivitas kependidikan dan aktivitas politik. Keduanya seakan dua sisi dari satu koin, tidak mungkin terpisahkan. Analisis Plato tersebut telah meletakkan fundamental bagi kajian hubungan politik dan pendidikan di kalangan generasi ilmuwan dan generasi berikutnya. Pada dasarnya apabila peran guru di sekolah sudah maksimal atau sudah dikatakan bagus mengajar peserta didik di dalam kelas dengan pelajaran materi PKn yang berkaitan dengan pendidikan politik dan peserta didik pun aktif di dalam kelas mengenai materi tersebut maka tidak percuma peran guru tersebut akan membuahkan hasil yang baik bagi guru manapun kepada peserta didik. Sebaliknya apabila guru sudah mengajar dengan baik tapi peserta didik tidak memperhatikan materi yang di sampaikan oleh guru itu adalah salah satu kesalahan cukup besar karena materi tersebut sangat penting yang harus didapati oleh peserta didik, materi tersebut bisa memakai kapan saja dan dimana saja, apabila materi tersebut berkaitan dengan pendidikan politik. Dalam pembelajaran tersebut yang berkaitan dengan materi pendidikan politik, peserta didik harus konsentrasi terhadap guru yang menyampaikan materi tersebut, dan jangan melakukan hal yang tidak diinginkan oleh guru, karena konsentrasi dalam kelas itu sangat penting untuk di lakukan, sebabnya apabila peserta didik tidak konsentrasi dalam kelas maka akan terjadi ketidak pahaman dengan materi yang disampaikan.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Guru dapat dihormati oleh masyarakat karena kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru,  maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab. Selama ini guru telah menjadi pelayan kepala sekolah, pemilik, penyelia, peneliti, penulis buku teks, dan penyusun kurikulum. Oleh karena itu, pendekatan penelitian (*research approach*) perlu diadopsi agar guru mampu membebaskan diri mereka dari posisi yang senantiasa dikontrol. Dalam hal ini, mereka dimotivasi untuk mengikuti spesifikasi kurikulum atau strategi mengajar, tetapi pada saat yang bersamaan juga dianjurkan untuk menelitinya dan mengevaluasinya secara kritis. Dengan kata lain, mereka didorong untuk aktif dalam kegiatan pengembangan professional yang bermanfaat dan sekaligus dilibatkan dalam proses penyempurnaan sehingga mereka akan menjadi mandiri dalam penilaian profesional (*professional judgment*). Keberhasilan pembangunan nasional banyak ditentukan oleh perkembangan pendidikan dan perkembangan politik. Oleh karena itu setiap warga negara yang baik (*good citizenship*) berhak mendapatkan pendidikan dan berhak pula untuk berpolitik.

Pendidikan politik yang diberikan dalam konteks politik praktis biasa dilakukan oleh partai-partai politik, ormas, organisasi pemuda dan organisasi lain yang bersifat politik. Maka pendidikan politik yang mendidik untuk siap menang siap kalah wajib diajarkan kepada warga negara terutama melalui peran pendidikan sebagai edukasi kepada peserta didik yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Program pendidikan politik disetiap negara tentu memiliki corak dan isi yang di sesuaikan dengan falsafah dan ideologi negaranya masing-masing. Di Indonesia yang berfalsafah Pancasila, target pendidikan politik itu adalah warga negara yang memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan pendidikan seperti yang tercantum dalam UU Sistem Pendidikan Indonesia (SISDIKNAS) No.20 Tahun 2003, yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Peserta didik di SMA yang bisa dikategorikan sebagai pemuda mempunyai tantangan dan tugas sebagai generasi yang memajukan bangsa melalui kemampuan dan kapasitasnya sebagai insan yang memiliki pemikiran yang baik untuk merubah hal yang buruk menjadi hal yang baik di dalam negaranya.

Menurut Bintoro (2003:226) dalam rangka kegiatan partisipasi dalam berpolitik ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Masalah pendidikan, pendidikan memberikan prasarat kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidup yang disertai pengembangan nilai-nilai dan sikap-sikap pemimpin-pemimpin formal yang memiliki legalitas dan pemimpin-pemimpin formal yang memiliki legitimitas.
2. Masalah berkomunikasi, salah satu unsur dari kepemimpinan yang sangan penting adalah komunikasi dalam mengembangkan komunikasi diperluka peran pemimpin-pemimpin yang dapat menjembatani komunikasi timbal balik.

Oleh karena itu dari pengertian di atas tidak terlepas dari proses politik yang yang dimanifestasikan melalui kebijakan pemerintah. Kemudian upaya memberikan pemahaman politik kepada generasi muda bisa dilakukan melalui jalur formal yaitu dilingkungan lembaga sekolah.

Program pendidikan politik melalui jalur pendidikan formal adalah dengan memberikan materi melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangatlah tepat dan baik, karena hal ini sejalan dengan UU SISDIKNAS No.20 Tahun 2003 pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Isi dari kurikulum setiap jenis dan jenjang pendidikan wajib memuat: a) Pendidikan Kewarganegaraan, b) Penddikan Agama dan c) Pendidikan Ilmu Alam”.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka materi yang dimuat pada kurikulum dari jenjang pendidikan adalah adanya Pendidikan Kewarganegaraan yang di dalamnya terdapat program pengajar yang bersifat Moral, Nilai, Sosial dan Politik. Dengan kata lain muatan materi dalam Pendidikan Kewarganegaraan pada saat ini terdapat konsep-konsep politik yang diajarkan sehingga peserta didik dibekali dengan pengetahuan dan konsep tersebut agar memahami dirinya sebagai insan politik yang mempunyai tugas-tugas politik dimasyarakat. Sejalan dengan hal diatas, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana untuk melestarikan dan mengembangkan nilai luhur moral sebuah bangsa yang berakar kepada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, Pendidikan Kewarganegaraan juga membekali para peserta didik dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antar warga Negara dan juga dengan warga Negara lain, serta pendidikan politik pun mendidik warga Negara agar bisa diandalkan oleh Bangsa dan Negara.

Berdasarkan studi pendahuluan di SMKN 2 Garut, bahwa untuk memberikan pemahaman politik pada peserta didik tentu tidak hanya ditentukan oleh lengkapnya kurikulum saja akan tetapi proses pembelajaran pendidikan politik, dalam hal ini peserta didik tergantung pula kemampuan para guru dalam mengelola materi pelajaran sehingga bagi seorang guru PKn harus selalu memahami perkembangan situasi dan menyerap berbagai informasi yang berkembang di lapangan untuk dijadikan bahan pembanding antara teori dan kenyataan. Oleh karena itu dalam melaksanakan peranan tersebut, dibutuhkan guru yang handal dan profesional yang memiliki dedikasi serta tanggung jawab terhadap pekerjaannya, agar perserta didik memehami terkait dengan pendidikan politik tersebut, karena pendidikan politik itu sangat manfaat untuk warga negara khususnya peserta didik agar mareka bisa mempunyai bekal untuk kedepannya, apalagi di negara kita menganut asas Demokrasi warganya harus paham terkait pendidikan politik dan politik yang baik. karena keadaan politik sekarang itu bisa dikatakan gagal dalam hal prakteknya, maka penulis judul skripsi ini manjadi alat pembantu pendidikan politik untuk warga negara khususnya kepada peserta didik.

Dewasa ini, guru juga harus mampu memecahkan masalah anak didiknya dalam rangka mempersiapkan menjadi warga negara yang baik dan insan politik yang berperan serta di lingkungan masyarakatnya. Pendidikan sering dijadikan media dan wadah untuk menanamkan ideologi negara atau sekaligus penopang kerangka politik. Di negara-negara barat, kajian tentang hubungan antara pendidikan dan politik dimulai oleh Plato dalam bukunya *Republic* yang membahas hubungan antara ideologi dan institusi negara dengan tujuan dan metode pendidikan. Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) pada usianya dikatakan masih labil. Tetapi pada usia itu masa-masa paling menentukan dalam proses pendidikan seorang individu, dalam usia itu ia mencoba menyerap berbagai konsep keilmuan dan mengaplikasikannya secara langsung ke masyarakat. Dalam usia tersebut, seorang individu sedang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengembangkan berbagai aspek yang ia miliki, baik aspek kognitif,afektif, maupun psikomotoriknya. Pada usia ini mudah untuk menanamkan konsep tentang berbagai hal baru, termasuk pendidikan politik. Hal ini menjadi penting agar kelak mereka tidak buta politik dan menjadi sasaran pembodohan politik.

Pendidikan politik memegang peranan penting untuk dapat mendidik generasi muda agar mendapat pemahaman yang jelas terhadap berbagai konsep dan simbol politik, terutama dalam membentuk kesadaran politiknya. Oleh karena itu, kesadaran politik bagi setiap para pemilih pemula sangat di perlukan agar mereka ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Demokrasi dalam suatu negara akan dapat tumbuh subur apabila dijaga oleh warga negaranya sendiri yang demokratis. Warga negara yang demokratis bukan hanya dapat menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga harus memikul tanggung jawab secara bersama-sama dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang lebih cerah.

` Kartini &Kartono (1996:16) mengemukakan bahwa PKn di sekolah berperan sebagai pendidikan politik bagi siswa, salah satu tujuan pendidikan politik adalah membuat rakyat menja di sadar politik. Sadar politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

Menjadi latar belakang permasalahan judul skripsi saya yaitu, pendidikan politik itu sangat penting bagi warga Negara khususnya peserta didik itu kurang antusias berbagai kagiatan politik, apa lagi yang menjadi objek peneliti yaitu di kelas XII, pada dasarnya kelas XII itu sudah bisa mengikuti perta demokrasi karena usia dan kemampuan mareka sudah siap untuk mengikuti berbagai perta demokrasi, apa bila mareka kurang partisipasi dengan politik maka akan terjadi permasalahan yang cukup besar. Dalam ungkapan Abernethy dan Coombe (1965:287), *education and politics are inextricably linked* (pendidikan dan politik terikat tanpa bisa dipisahkan). Hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok (*group attitudes*), masalah pengangguran (*employment*), dan peranan politik kaum cendikia (*the political role of the intelligensia*). Bertitik tolak dari hal tersebut maka penulis mencoba memperdalam masalah ini dengan penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“PERAN GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PEMAHAMAN PENDIDIKAN POLITIK PADA PESERTA DIDIK”** (Studi deskriptif di Kelas XII SMK Negeri 2 Garut).

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Masih ada sebagian peserta didik yang belum memahami tentang makna dari pendidikan politik.
2. Banyaknya permasalahan dalam segi pendidikan yang terjadi di sekolah terhadap peserta didik seperti belum memahami pendidikan politik.
3. Memudarnya rasa ingin tahu tentang pendidikan politik
4. **Rumusan Masalah**
5. **Rumusan Masalah Umum**

Berdasarkan latar belakang diatas untuk mepermudahkan proses penelitian dan supaya tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penelitian ini. Maka secara umum masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Sejauh mana peran guru pendidikan ke warganegaraan dalam mengimplementasikan pemahaman pendidikan politik pada peserta didik?”

1. **Rumusan Masalah Khusus**
	1. Bagaimana peran guru PKn terhadap pendidikan politik pada peserta didik kelas XII di SMK Negeri 2 Garut?
	2. Bagaimana implementasi dari pendidikan politik bagi peserta didik XII di SMK Negeri 2 Garut?
	3. Bagaimana pemahaman pendidikan politik bagi peserta didik kelas XII SMK Negeri 2 Garut?
2. **Batasan Masalah**

Mengingat luasnya ruang lingkup kajian yang berkaitan dengan masalah tersebut diatas yang berkaitan dan keterbatasan penulis maka perlu adanya pembatasan masalah dengan tujuan menyederhanakan masalah penelitian dan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian ini dibatasi dalam beberapa sub masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pendidikan politik pada peserta didik kelas XII di SMK Negeri 2 Garut
2. Bagaimana implementasi dari pendidikan politik bagi peserta didik XII di SMK Negeri 2 Garut
3. Bagaimana pemahaman pendidikan politik bagi peserta didik kelas XII SMK Negeri 2 Garut
4. **Tujuan Penelitian**

Menurut Tanjung (2005:56) mengungkapkan bahwa tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. **Tujuan Umum**

Penelitian ini betujuan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang dikemukakan diatas, yang secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara faktual dan aktual mengenai peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam mengimplementasikan pemahaman pendidikan politik pada siswa

1. **Tujuan Khusus**
2. Untuk mengetahui peran PKn guru terhadap pendidikan politik pada peserta didik kelas XII di SMK Negeri 2 Garut.
3. Untuk mengetahui implementasi dari pendidikan politik bagi peserta didik XII di SMK Negeri 2 Garut.
4. Untuk mengetahui pemahaman pendidikan politik bagi peserta didik kelas XII SMK Negeri 2 Garut
5. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan siswa tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengimplementasikan pemahaman pendidikan politik.

**2. Manfaat Praktis**

a. Bagi penulis sebagai wacana untuk memperdalam cakrawala pemikiran dan pengetahuan yang kritis tentang mengimplementasi pemahaman pendidikan politik

b. Bagi lembaga sekolah

sebagai bahan masukan dalam mengimplemetasikan pemahama pendidikan politik.

c Bagi penulis lain

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan rujukan dan masukan baru bagi perkembagan penulisan selanjutnya.

1. **Variabel dan Indikator Penelitian**
2. Variabel Bebas (Variabel X)

Variabel bebas/ metode kualitatif (variabel X) adalah variabel yang dikontrol oleh peneliti dan dikenalkan kepada subejk untuk yang menentukan efeknya terhadap reaksi subjek. Dalam kolerasi sederhana, variabel bebas merupakan variabel criterion yaitu variabel yang tengah diukur dan dikolerasikan. Variabel bebas (Variabel X) dari penelitian ini adalah **“Peran Guru PPKn”**. Indikator dari variabel bebas ini menurut Sagala (2014, hlm 35-38) adalah sebagai:

a). Inspirator .sw

b). Informator.

c). Fasilitator.

d). Mediator.

e). Evaluator.

1. Vatiabel Terikat (Variabel Y)

Dalam penelitian ini yang menjadi Variabel terikat/dependen (Variabel Y) adalah “Meningkatkan Pemahaman Pendidikan Politik Pada Peserta Didik”. Adapun indikator dari “**Pemahaman Pendidikan Politik Pada Peserta Didik”** menurut Kartini Kartono (2009,hlm 62-63)

* 1. Cinta tanah air
	2. Peduli terhadap pendidikan
	3. Peduli terhadap ekonomi

**H**. **Struktur Organisasi Skripsi**

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan sisitem penyusunan sebagai berikut :

1. **BAB I Memuat :**
	1. Latar Belakang
	2. Rumusan Masalah
	3. Batasan Masalah
	4. Tujuan Penelitian
	5. Manfaat Penelitian
	6. Struktur Organisasi Penelitian
2. **BAB II Memuat :**
	1. Kajian Teori Peran Guru PKn
	2. Peran Teori Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
	3. Peran Pendidikan Politik Pada Peserta Didik
	4. Implementasi Pendidikan Politik Pada Peserta Didik
	5. Konsep Tentang Pemahaman Politik Pada Peserta Didik
	6. Pemahaman Siswa Pada Politik Dalam Mengimplementasikan di Sekolah
3. **BAB III Memuat :**
	1. Metode Penelitian
	2. Subjek dan Objek Penelitian
	3. Lokasi dan Waktu Penelitian
	4. Instrumen Penelitian
	5. Teknik Penelitian
	6. Teknik Analisis Data
	7. Teknik Analsis Data
4. **BAB IV Memuat:**
	1. Sejarah Sekolah dan Kondidi Lingkungan Sekolah
	2. Profil Sekolah
	3. Deskripsi Hasil Penelitian
	4. Pembahasan Hasil Penelitian
	5. Hasil Analisis Data Pembahasan Penelitian
	6. Penerapan Analaisis Wawancara
5. **BAB V Memuat:**
	1. Kesimpulan
	2. Saran